



**MORALITAS KORPORASI DAN RELEVANSINYA BAGI UPAYA  
PEMBANGUNAN MASYARAKAT INDONESIA DI BAWAH  
PENYELENGGARAAN SISTEM OTONOMI DAERAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat  
Agama Katolik**

**Oleh:**

**FRANSISKUS CHARLY KA'U**

**NPM: 17. 75. 6107**

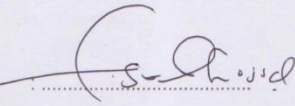
**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO**

**2021**

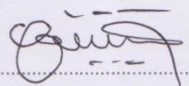
LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

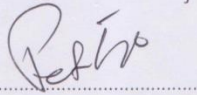
1. Nama : Fransiskus Charly Ka'u
2. NPM : 17.75.6107
3. Judul : Moralitas Korporasi dan Relevansinya Bagi Upaya Pembangunan Masyarakat Indonesia di Bawah Penyelenggaraan Sistem Otonomi Daerah

4. Pembimbing:

1. Ferdinandus Sebho, S. Fil., Lic. 

(Penanggung Jawab)

2. Gregorius Nule, Drs., Lic. 

3. Dr. Petrus Dori 

5. Tanggal diterima

: 4 November 2020

6. Mengesahkan:

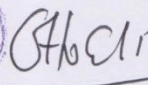
Wakil Ketua I



Dr. Yosef Keladu

7. Mengetahui

Ketua STFK Ledalero



Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian  
dari Syarat-syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Filsafat  
Agama Katolik

Pada

7 Juni 2021

Mengesahkan

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO



KETUA,

Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI

1. Gregorius Nule, Drs., Lic.

2. Ferdinandus Sebho, S. Fil., Lic.

3. Dr. Petrus Dori

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fransiskus Charly Ka'u

NPM : 17.75.6107

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri, dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi akademis, yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui.

Ledelero, 29 Mei 2021

Yang menyatakan

Fransiskus Charly Ka'u

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fransiskus Charly Ka'u

NPM : 17.75.6107

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

**Moralitas Korporasi dan Relevansinya bagi Upaya Pembangunan Masyarakat Indonesia di Bawah Penyelenggaraan Sistem Otonomi Daerah**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero

Pada tanggal : 29 Mei 2021

Yang menyatakan

Fransiskus Charly Ka'u

## ABSTRAK

Fransiskus Charly Ka'u. 17.75. 6107. *Moralitas Korporasi dan Relevansinya bagi Upaya Pembangunan Masyarakat Indonesia di Bawah Penyelenggaraan Sistem Otonomi Daerah*. Skripsi. Program Studi Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: *pertama*, memberikan gambaran secara umum berkenaan dengan hakikat korporasi. *Kedua*, memberikan gambaran secara umum berkenaan dengan penyelenggaraan sistem Otonomi Daerah. *Ketiga*, berusaha meneropong aktivitas-aktivitas korporasi dari sudut pandang moral dan pentingnya moralitas korporasi bagi upaya pembangunan masyarakat di bawah penyelenggaraan sistem Otonomi Daerah. Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Penulis menggunakan buku-buku, literatur-literatur, dan sumber tulisan lainnya yang membantu penulis untuk memperdalam tema yang diangkat oleh penulis.

Korporasi pertama-tama didefinisikan sebagai makhluk artifisial yang diciptakan oleh hukum secara sah. Sebagai makhluk artifisial, korporasi memiliki beberapa karakter khas, seperti tidak bisa dilihat dan tidak berwujud sehingga tidak bisa diraba. Namun, sebagai organisasi bisnis korporasi sanggup membuat kontrak dan melakukan berbagai macam operasi bisnis yang bertujuan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Setelah Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944, korporasi mengalami pertumbuhan yang cepat. Hal ini bisa dilihat dari munculnya korporasi-korporasi transnasional, yaitu korporasi-korporasi yang menjalankan operasi bisnisnya di beberapa wilayah sekaligus pada waktu yang bersamaan. Ironisnya, operasi bisnis yang dijalankan oleh korporasi-korporasi sering menimbulkan banyak persoalan, seperti kerusakan lingkungan, perampasan hak-hak masyarakat lokal, serta bisa menggagalkan berbagai macam program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintahan negara setempat. Di Indonesia, kehadiran korporasi pada kenyataannya gagal membantu pemerintah untuk menyukseskan program pembangunan di bawah penyelenggaraan sistem Otonomi Daerah. Sistem Otonomi Daerah itu sendiri secara sepintas sering dilihat hanya sebatas pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, tetapi sebenarnya sistem Otonomi Daerah memiliki beberapa idealisme lainnya, seperti menciptakan masyarakat yang demokratis, proses edukasi politik, dan terealisasinya kebijakan-kebijakan publik yang mengutamakan pengembangan potensi-potensi lokal. Akan tetapi, kehadiran korporasi yang berorientasi pada keuntungan ekonomis telah mengabaikan tujuan utama dari penyelenggaraan sistem Otonomi Daerah. Bahkan, kehadiran korporasi malah sering menyengsarakan masyarakat lokal.

Oleh karenanya, meninjau aktivitas bisnis korporasi dengan berdasar pada nilai-nilai moral adalah sesuatu yang mendesak. Tujuan dari tinjauan ini adalah agar kehadiran korporasi sanggup mendukung terselenggaranya pembangunan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan sejak awal dengan berlakunya sistem Otonomi Daerah.

**Kata-kata kunci:** Korporasi, sistem Otonomi Daerah, moralitas, moralitas korporasi, dan pembangunan masyarakat Indonesia.

## ABSTRACT

Fransiskus Charly Ka'u. 17.75.6107. **The Morality of Corporation and Its Relevance for the Development Effort of Indonesian Community under the Implementation of the Regional Autonomy System.** Essay. Philosophy Study Program, Ledalero Catholic School of Philosophy, 2021.

This study aims to: first, provide a general description of the nature of the corporation. Second, provide a general description regarding to the implementation of the Regional Autonomy system. Third, trying to observe the activities of corporation through a moral point of view and the importance of corporate morality for the community development effort under the implementation of the Regional Autonomy system. In completing this study, the author uses the literature study method. The author uses books, literatures, and other writing sources that help the author to deepen the them raised by the author.

Corporation is defined first of all as artificial being created by law. As artificial beings, corporation has several distinctive characteristics, such as being invisible and intangible so it cannot be touched. However, as a business organization, corporation is able to make contracts and carry out various kinds of business operations with the aim of reaping the maximum profit. After the Bretton Woods Conference in 1944, the corporation experiences the rapid growth. This can be seen from the emergence of transnational corporations, namely corporations that run their business operations in several areas at the same time. Ironically, business operations run by corporations often cause many problems, such as environmental damage, deprivation of local people's rights, and can fail various development programs that have been launched by local state governments. In Indonesia, the presence of corporations in fact have failed to help the government in succeeding the development programs under the implementation of the Regional Autonomy system. The Regional Autonomy system itself is often seen as merely a delegation of authority from the center to the regions, but in fact the Regional Autonomy system has several other ideals, such as creating a democratic society, political education processes, and the realization of public policies that prioritize the development of local potencies. However, the presence of corporation that is oriented towards economic benefits has neglected the main purpose of implementing the Regional Autonomy system. Even, the presence of corporation often makes local communities miserable.

Therefore, reviewing corporate business activities based on moral values is something urgent. The purpose of this review is that the presence of corporation is able to support the implementation of community development as aspired from the beginning with the enactment of the Regional Autonomy system.

**Keywords: Corporation, Regional Autonomy system, morality, corporate morality, and the development of Indonesian society.**

## KATA PENGANTAR

Fakta yang paling ditakutkan oleh masyarakat pada saat ini adalah situasi masa depan yang akan dipenuhi dengan persoalan peningkatan suhu bumi, kelangkaan sumber daya alam, serta semakin melebarnya kesenjangan antara segelintir elite kaya dan mayoritas masyarakat miskin di dunia. Sebab, persoalan-persoalan ini bukan hanya berhubungan dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat saja, melainkan berhubungan erat dengan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Persoalan-persoalan ini jelas berhubungan erat dengan fakta kerusakan alam yang acap kali diakibatkan oleh kehadiran korporasi-korporasi, baik di dalam sektor pertambangan, pariwisata, pertanian, kelautan, dan perkebunan. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa di bawah penyelenggaraan sistem Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah malah cenderung bekerja untuk melayani kepentingan korporasi-korporasi. Perselingkuhan antara korporasi dan Pemerintah Daerah ini secara faktual semakin menguatkan posisi sosial korporasi di tengah masyarakat. Padahal, secara hukum korporasi sendiri sudah dilengkapi dengan berbagai macam keistimewaan sebagai makhluk artifisial. Ironisnya, posisi korporasi yang semakin menguat ini malah melanggengkan langkah korporasi untuk memenuhi hasratnya dalam meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengabaikan manusia-manusia riil dengan seluruh dimensinya, seperti budaya dan lingkungan hidup.

Karya ilmiah ini hadir sebagai sebuah tinjauan kritis penulis terhadap berbagai macam persoalan kemanusiaan yang terjadi akibat berbagai operasi bisnis yang sedang dan telah terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara khusus di bawah penyelenggaraan sistem Otonomi Daerah. Bahwasannya ada dua hal penting yang mesti diperhatikan demi menunjang tercapai kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Pertama*, Penyelenggaraan sistem Otonomi Daerah mesti bermuara pada upaya pembangunan manusia. *Kedua*, korporasi di bawah penyelenggaraan Sistem Otonomi Daerah mesti bisa mendukung proyek pembangunan manusia. Oleh karena itu, korporasi perlu menyadari posisinya ini melalui tindakan-tindakan bisnis



yang berpedoman terhadap nilai-nilai moral. Moralitas penting sebagai teropong untuk melihat sejauh mana tindakan-tindakan bisnis korporasi berguna untuk mendukung aktualisasi manusia riil secara memadai.

Karya ilmiah ini juga hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual penulis untuk meraih gelar sarjana pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. Dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang telah membantu penulis dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menyampaikan ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam proses penyelesaian karya tulis ini. *Pertama*, ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena atas bimbingan-Nya karya tulis ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

*Kedua*, penulis mengucapkan terima kasih khusus kepada Gregorius Nule, Drs., Lic. selaku pembimbing yang telah dengan sangat setia mendampingi penulis selama proses penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada Ferdinandus Sebho, S. Fil., Lic. yang bersedia menjadi penguji dan memberikan beberapa catatan kritis untuk memperkaya tulisan ini. *Ketiga*, ucapan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk mengembangkan diri secara lebih baik dari waktu ke waktu, secara khusus dengan tersedianya perpustakaan yang telah memudahkan penulis dalam menemukan sumber-sumber untuk menyelesaikan karya tulis ini.

*Keempat*, ucapan terima kasih kepada Serikat Sabda Allah, Pater Rektor dan konfrater SVD di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, P. Pice Dori, SVD, P. Yanto Naben, SVD, dan semua konfrater di Wisma St. Arnoldus Janssen-Nitapleat yang telah memberikan dukungan demi terselesainya karya tulis ini. Penulis merasa perlu menyampaikan terima kasih khusus kepada Karno Raang, Salvus Mite, Edy Soge, Florianus Patut, Agung Siga, Yondi Leki, Ari Aran, Ando Sola, dan Ertus Pangu yang telah dengan setia dan tekun membantu mengoreksi karya tulis ini dalam seluruh proses penyelesaiannya. *Kelima*, ucapan terima kasih kepada keluarga

tercinta, Bapa Thadeus Embu, Mama Silvianti Maria Sego, Oma Theresia Ka'u, dan ketiga saudara: Fritz Embu, Deri Say, Romi Banggo yang telah memberikan segala-galanya bagi penulis. Penulis juga mengucapkan limpah terima kasih kepada semua kenalan yang dengan caranya masing-masing telah mendukung penulis dalam seluruh proses pengerjaan karya tulis ini.

Akhirnya penulis menyadari dan mengakui bahwa karya tulis ini masih jauh dari bentuk tulisan yang sempurna dan komprehensif. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi penyempurnaan karya tulis ini.

Ledalero, 29 Mei 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penulisan.....	9
1.4 Metode Penulisan.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II KORPORASI .....</b>	<b>11</b>
2.1 Definisi tentang Korporasi .....	11
2.2 Kelahiran dan Perkembangan Korporasi: Sebuah Tinjauan Historis .....	14
2.2.1 Korporasi sebagai Sebuah Organisasi Tradisional Masyarakat yang Mengalami Transformasi.....	14
2.2.2 Sains, Imperialisme, Kapitalisme, dan Kultur Pasar Bebas .....	16
2.2.3 Pertumbuhan Korporasi dalam Sistem Ekonomi Neoliberal .....	20
2.3 Karakteristik-Karakteristik Korporasi.....	26
2.3.1 Korporasi sebagai Manusia Artifisial .....	26
2.3.2 Tanggung Jawab Terbatas Korporasi .....	27
2.3.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	27

2.4 Struktur Internal Korporasi.....	29
2.4.1 Para Pemilik Perusahaan .....	29
2.4.2 Para pengawas Perusahaan atau Direktur .....	30
2.4.3 Eksekutor atau Para Manajer.....	31
2.4.4 <i>Stakeholders</i> : Sebuah Unsur Tandingan .....	31
2.5 Korporasi dan Gambaran Umum Berbagai Macam Persoalan Sosial- Kemasyarakatan.....	32
2.5.1 Persoalan Kemanusiaan .....	32
2.5.2 Persoalan Ekologi dan Ketidakjujuran Korporasi .....	33
2.5.3 Kesenjangan antara yang Kaya dan Miskin .....	35
2.5.4 Kekuasaan yang Sewenang-wenang Vs Masyarakat yang Tidak Berdaya.....	36

**BAB III PENYELENGGARAAN SISTEM OTONOMI DAERAH DI  
INDONESIA ..... 37**

3.1 Beberapa Definisi Otonomi Daerah.....	37
3.2 Beberapa Istilah Penting dalam Otonomi Daerah.....	39
3.3 Penyelenggaraan Sistem Otonomi Daerah di Indonesia: dari Sentralisasi kepada Desentralisasi.....	41
3.3.1 Krisis Tahun 1998 sebagai Cikal Bakal Perubahan Paradigma .....	41
3.3.2 Otonomi Daerah sebagai Solusi .....	42
3.3.3 Visi dan Konsep Otonomi Daerah.....	44
3.4 Implementasi Otonomi Daerah.....	46
3.4.1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.....	46
3.4.2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah .....	48
3.4.3 Karakter Kebaruan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 .....	50
3.4.4 Beberapa Pembaharuan dalam Undang-Undang tentang Otonomi Daerah.....	51
3.4.4.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 .....	51
3.4.4.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 .....	53
3.4.4.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 .....	54
3.4.5 Sasaran Penyelenggaraan Sistem Otonomi Daerah.....	55
3.4.6 Otonomi Daerah dan Beberapa Prasangka Konsepsional.....	58

**BAB IV MORALITAS KORPORASI DAN RELEVANSINYA BAGI UPAYA  
PEMBANGUNAN MASYARAKAT INDONESIA DI BAWAH  
PENYELENGGARAAN SISTEM OTONOMI DAERAH..... 61**

4.1	Moralitas Korporasi .....	61
4.1.1	Moralitas Korporasi: Kemampuan Membedakan yang Baik dan yang Buruk	63
4.1.2	Korporasi dan Kesadaran Moral.....	67
4.1.2.1	Kebebasan .....	69
4.1.2.2	Tanggung Jawab.....	72
4.1.3	Komitmen pada Hak dan Kewajiban .....	75
4.2	Pembangunan Manusia sebagai Basis Pembangunan Masyarakat Indonesia .....	79
4.2.1	Pentingnya Perubahan Paradigma Pembangunan.....	79
4.2.2	Komponen Pembangunan Manusia .....	81
4.2.3	Pembangunan yang Berkelanjutan: Tanggung Jawab Sosial Masyarakat dan Keadilan Intergenerasi .....	85
4.2.4	Pembangunan Sumber Daya Manusia .....	86
4.3	Penyelenggaraan Sistem Otonomi Daerah dan Pembangunan Masyarakat Indonesia .....	88
4.3.1	Idealisme Pembangunan Otonomi Daerah.....	88
4.3.1.1	Kemandirian Pemerintah Daerah .....	89
4.3.1.2	Proses Demokratisasi Masyarakat Lokal.....	91
4.3.1.3	Tercapainya Pendidikan Politik .....	92
4.3.1.4	Akuntabilitas Publik .....	93
4.3.1.5	Kesetaraan Politik.....	95
4.3.1.6	Beberapa Idealisme Lainnya .....	95
4.3.2	Korporasi Era Otonomi Daerah dan Beberapa Persoalan Kronis .....	97
4.3.2.1	Gambaran Singkat Pertumbuhan Korporasi di Era Otonomi Daerah .....	97
4.3.2.2	Sistem Ekonomi Neoliberal sebagai Spirit Dasar Ekspansi Korporasi-Korporasi Transnasional dan Lokal .....	98
4.3.2.3	Korporasi dan Program-Program Manipulatif .....	99
4.3.2.3.1	Pemberian Surat Izin Usaha Tanpa Partisipasi Masyarakat .....	100
4.3.2.3.2	Teori Ekonomi <i>Trickle Down Effect</i> dan Gagalnya Fokus Pembangunan .	100
4.3.2.3.3	Produk Domestik Bruto sebagai Ilusi Pertumbuhan Ekonomi .....	102

4.3.2.3.4	Pemerintah Daerah yang Korup dan Gagalnya Proses Demokratisasi Masyarakat Lokal.....	103
4.3.2.4	Kehadiran Korporasi dan Gagalnya Kemandirian Daerah .....	105
4.4	Relevansi Moralitas Korporasi Terhadap Pembangunan Manusia di Bawah Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah .....	107
4.4.1	Korporasi dan Pembangunan Masyarakat yang Holistik.....	107
4.4.2	Korporasi dan Pemberdayaan Hak-Hak Asasi Manusia.....	108
4.4.3	Korporasi dan Proyek Demokratisasi Masyarakat .....	109
4.4.4	Korporasi dan Kemandirian Daerah .....	110
4.4.5	Korporasi dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal.....	111
4.5	Catatan Kritis: Perjanjian Kerja sebagai Jalan Tengah.....	112
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>114</b>
5.1	Kesimpulan.....	114
5.2	Usul Saran .....	117
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>120</b>